



PENINGKATAN KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-JEPANG

Lisbet*)

Abstrak

Tulisan ini ingin menganalisa mengenai peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Jepang. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Selain di sektor ekonomi, perdagangan dan investasi, Indonesia juga membutuhkan Jepang dalam kerja sama infrastruktur. Sementara Jepang membutuhkan Indonesia dalam peningkatan kerja sama pertahanan-keamanan. Sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di ASEAN, Jepang membutuhkan Indonesia untuk mengajak China berdialog dan patuh pada Konvensi Hukum Laut PBB terkait situasi Laut China Selatan. Selain itu, Jepang juga membutuhkan Indonesia untuk mengajak Korea Utara agar mau menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Jadi, kerja sama bilateral kedua negara dilandaskan pada asas saling membutuhkan. Kendati demikian, Indonesia harus dapat meningkatkan level kerja sama bilateral kedua negara ini agar dapat lebih menguntungkan bagi Indonesia di kemudian hari.

Pendahuluan

Kerja sama bilateral Jepang dan Indonesia telah terjalin sejak tahun 1958. Sejak saat itu, kerja sama di antara kedua negara telah menghasilkan beberapa kesepakatan, seperti *The Strategic Economic Partnership Agreement* pada tahun 2006 dan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* pada tahun 2007, serta yang terbaru adalah pembentukan *Indonesia-Japan Maritime Forum* pada tahun 2016.

Kerja sama kedua negara yang telah berjalan baik tersebut juga ditandai dengan adanya kunjungan Perdana Menteri (PM)

Jepang Shinzo Abe ke Indonesia pada tanggal 15-16 Januari 2017. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral kedua negara meskipun pembahasan terkait ekonomi, investasi dan perdagangan masih merupakan fokus utama dalam kunjungan kali ini. Hal ini terlihat dari sebagian besar anggota rombongannya yang merupakan direktur utama perusahaan-perusahaan besar di Jepang yang bergerak di bidang perbankan, manufaktur, industri baja, dan transportasi.

Indonesia selama ini lebih diuntungkan melalui kerja sama bilateral, karena kerja

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: lisbet.sihombing@dpr.go.id



sama ini lebih banyak difokuskan pada sektor ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kendati demikian, apakah Indonesia juga masih memiliki kepentingan lainnya dari kerja sama bilateral ini? Dan, apa sajakah kepentingan yang diinginkan oleh Jepang dari kerja sama bilateral ini?

Kepentingan Indonesia

Di sektor perdagangan, Jepang adalah mitra dagang strategis terbesar kedua bagi Indonesia. Nilai kerja sama Indonesia dan Jepang pada tahun 2016 telah mencapai 31 miliar dolar AS. Adapun produk Indonesia yang diekspor ke Jepang di antaranya adalah mesin dan perlengkapan, bahan bakar, bahan makanan, bahan-bahan kimia, tekstil, dan bahan mentah, sedangkan beberapa produk yang diimpor Indonesia dari Jepang antara lain: kendaraan bermotor, perlengkapan transportasi, semi konduktor, produk elektronik, dan bahan-bahan kimia.

Pada sektor perdagangan, Indonesia membutuhkan Jepang terutama dalam membangun Industri Kecil Menengah yang terdapat di Indonesia. Pada tahun 2017, kerja sama perdagangan kedua negara akan fokus pada pelaksanaan *bilateral value change* antara Industri Kecil Menengah (IKM) Jepang dan Indonesia melalui *The Japan External Trade Organization* (JETRO); pengembangan program *E-Smart* IKM; serta peningkatan kualitas IKM yang beroperasi di Cepher, Klaten dan Tegal, Jawa Tengah. Melalui program-program ini diharapkan IKM di Jawa Tengah dapat lebih berdaya saing dan memiliki akses pasar yang luas melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Selain itu, kerja sama perdagangan kedua negara juga akan difokuskan untuk peningkatan daya saing produk logam yang berasal dari IKM Cepher, seperti pada pemenuhan standar produk logam melalui sertifikasi SNI dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam pembuatan blokrem komposit.

Sedangkan di sektor investasi, pada tahun 2016, nilai realisasi investasi Jepang di Indonesia mencapai 4,5 miliar dolar AS. Nilai investasi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, terlebih lagi di tengah kelesuan ekonomi dunia saat ini. Kendati demikian, pada tahun 2015, Jepang memberikan kontribusi investasi paling tinggi melalui industri otomotif yaitu sebesar 1,18 miliar dolar AS, lalu di sektor industri dan

properti yakni sebesar 520 juta dolar AS, kemudian industri logam, elektronik, dan mesin dengan nilai sebesar 426 juta dolar AS, serta investasi di listrik, air, dan gas sebesar 134 juta dolar AS. Bahkan pada tahun 2017, nilai investasi Jepang akan meningkat mencapai 74 milyar yen (Rp8,6 triliun) di sektor irigasi dan konservasi pantai.

Dengan semakin meningkatnya nilai sektor perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia, maka Indonesia semakin mengandalkan kerja sama dengan Jepang. Hal ini terlihat dari keinginan-keinginan Indonesia yang disampaikan pada saat kunjungan PM Abe. Keinginan-keinginan tersebut antara lain meminta Jepang agar mempercepat pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat yakni dengan segera membentuk perusahaan patungan atau konsorsium senilai 3 miliar dolar AS; mempercepat kerja sama soal perkeretaapian untuk jalur kereta api cepat Jakarta-Surabaya senilai 7,8 miliar dolar AS; merealisasikan rencana pembahasan Blok Masela untuk merubah masa kontrak dari 10 tahun menjadi 7 tahun; meminta komitmen Jepang agar dapat membantu membangun pembangkit listrik; membuka akses terhadap produk-produk hasil pertanian dan perikanan Indonesia. Sebaliknya Indonesia juga akan meningkatkan akses dan peningkatan kapasitas keperawatan Indonesia sehingga dapat memenuhi pasar di Jepang.

Selain beberapa sektor di atas, Indonesia juga mengandalkan Jepang dalam kerja sama pada sektor maritim. Sebagai sesama negara maritim, Indonesia dan Jepang menganggap penting peningkatan kerja sama maritim. Untuk itu, Indonesia meminta Jepang untuk mau aktif dalam mendorong kerja sama keamanan laut, mendirikan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau terdepan di Indonesia serta pengembangan pulau-pulau terpencil di Indonesia seperti di Sabang, Natuna dan Morotai melalui Forum Maritim Indonesia-Jepang (*Indonesia-Japan Maritime Forum*) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2016. Melalui forum ini pula, kedua negara akan membahas kerja sama pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas dan investasi di sektor maritim. Peningkatan kerja sama maritim ini juga merupakan keuntungan bagi Indonesia karena sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros

maritim dunia, terutama pada pilarnya yang keempat, yakni mengajak semua negara mitra Indonesia untuk mau bekerjasama pada sektor maritim melalui diplomasi maritim.

Kepentingan Jepang

Di sektor pertahanan dan keamanan, kerja sama *military-military* kedua negara sudah dimulai dengan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sistem lalu lintas kapal dan penyediaan kapal patroli dari Jepang. Meski demikian, kedua negara menyadari bahwa kerja sama tersebut perlu ditingkatkan pada level yang tinggi lagi. Oleh karena itu, pada tanggal 1 November 2011, diselenggarakan *First Political-Military* dan *Fourth Military-Military Talk* pada level Direktur Jenderal dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Pertemuan ini merupakan perintis terhadap pertemuan rutin “2 + 2” (*Political-Military Talks*) pada level Menteri kedua negara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015, yang merupakan pertemuan pertama antar Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara (*First Japan-Indonesia Foreign and Defense Meeting*). Pada pertemuan ini, para menteri dari kedua negara membahas semua isu yang terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan maupun sektor maritim seperti isu Laut China Selatan dan Semenanjung Korea.

Bagi Indonesia dan Jepang, Laut China Selatan merupakan jalur yang sangat penting bagi kedua negara untuk melakukan aktivitas ekonomi dunia dan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki kepentingan terhadap perdamaian dan stabilitas keamanan di Laut China Selatan. Dalam menangani situasi ini, kedua negara juga menekankan pentingnya prinsip penegakan hukum, tidak menggunakan paksaan atau kekuatan; penyelesaian sengketa secara damai; dan menjunjung tinggi kebebasan dalam bernavigasi dan penerbangan, serta perdagangan tanpa hambatan yang dilakukan dengan prinsip penghormatan kepada hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) tahun 1982.

Jepang berkepentingan terhadap situasi di Laut China Selatan karena Jepang khawatir terhadap sikap China yang semakin agresif. Beberapa waktu lalu, China telah melaksanakan pembangunan sistem anti

pesawat terbang dan anti rudal di 7 pulau buatan di Kepulauan Spratly. Selain itu, Jepang juga menganggap apa yang telah dilakukan oleh China tersebut telah mengancam keamanan kawasan. Oleh karena itu, Jepang mengajak Indonesia untuk dapat berkoordinasi serta bekerja sama menangani situasi ini. Jepang memerlukan Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang memiliki pengaruh di ASEAN, untuk dapat melakukan dialog dengan China agar mau menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Pada setiap pertemuan di tingkat ASEAN maupun internasional, Indonesia senantiasa mendorong China agar mau berdialog dan berpegang pada UNCLOS. Meskipun Indonesia tidak terlibat sengketa secara langsung dengan China, Indonesia juga senantiasa bersikap tegas terhadap China terlebih lagi setelah terjadi insiden kapal China mencari ikan di perairan Indonesia sebanyak 2 kali pada tahun 2016, sehingga harus diusir oleh TNI AL karena China mengklaim bahwa berdasarkan peta China, yang berupa sembilan garis putus-putusnya (*nine dash*), terletak mendekati ZEE Kepulauan Natuna.

Terkait situasi di Semenanjung Korea, Jepang juga menyatakan kekhawatirannya terhadap tindakan Korea Utara dalam uji coba senjata nuklir dan peluncuran rudal jarak jauh. Tahun 2016 lalu, Korea Utara sudah beberapa kali melakukan peluncuran roket serta uji coba nuklir. Kekhawatiran Jepang adalah wajar, karena tindakan Korea Utara ini juga telah menimbulkan reaksi negara lain, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, karena dianggap dapat mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam keamanan bersama tersebut perlu dihentikan.

Meskipun secara geografis, letak Indonesia jauh dari kawasan tersebut, namun Indonesia juga menyesalkan tindakan Korea Utara yang tetap melakukan uji coba nuklir dan peluncuran roketnya. Indonesia menganggap bahwa tindakan Korea Utara tersebut tidak sesuai dengan semangat yang terkandung dalam perjanjian *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) serta melanggar kewajiban Korea Utara berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1718 (Tahun 2006), 1874 (Tahun 2009), 2987 (Tahun 2013) dan 2270 (Tahun 2016).

Sebagai negara yang juga mempunyai hubungan baik dengan Korea Utara (baik

melalui aktor negara maupun parlemen), Indonesia patut mengingatkan Korea Utara agar mau mematuhi kewajiban internasionalnya dan mau melaksanakan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Sebaiknya hubungan yang terjalin di antara kedua negara sejak Januari 1964, dapat dijadikan pegangan bagi Indonesia untuk mengajak Korea Utara berdialog dan mengedepankan diplomasi agar tercipta perdamaian dan stabilitas di kawasan Semenanjung Korea.

Penutup

Adanya peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang dilandaskan pada asas saling membutuhkan. Jepang membutuhkan dukungan Indonesia di sektor pertahanan dan keamanan terutama dalam menghadapi situasi yang terjadi di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea. Sementara Indonesia membutuhkan Jepang dalam banyak sektor, seperti ekonomi, perdagangan, investasi, infrastruktur, serta maritim. Padahal, jika dilihat dari nilai produknya, produk yang diimpor Indonesia dari Jepang merupakan produk-produk yang bernilai tinggi/mahal, sedangkan produk-produk Indonesia yang diekspor ke Jepang masih bernilai rendah karena berupa bahan mentah dan bahan makanan. Oleh karena itu ke depan, Indonesia perlu berusaha agar kerja sama kedua negara di sektor perdagangan bisa lebih menguntungkan Indonesia.

Selama ini kerja sama bilateral kedua negara memang lebih banyak dilakukan aktor pemerintah dan sektor swasta, dan dengan semakin meningkatnya kerja sama bilateral kedua negara, parlemen (melalui aktivitas diplomasi parlemen) perlu turut memperkuat kerja sama bilateral ini. DPR RI melalui GKSB DPR RI-Parlemen Jepang dapat menjadi bagian dalam upaya peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Jepang tersebut.

Referensi

- “Filipina Protes Tiongkok atas Pembangunan di LCS”, *Suara Pembaruan*, 17 Januari 2016.
- “Indonesia dan Jepang Terus Kembangkan Kerja Sama Ekonomi”, <http://presidenri.go.id/kabar-presiden/kegiatan-kepresidenan/indonesia-dan-jepang-terus-kembangkan-kerjasama-ekonomi.html>, diakses 17 Januari 2017.
- “Indonesia-Jepang Terus Pacu Peningkatan Perdagangan dan Investasi”, <http://www.bkpm.go.id/publication/detail/indonesia-jepang-terus-pacu-peningkatan-perdagangan-dan-investasi>, diakses 23 Januari 2017.
- “Joint Statement First Japan-Indonesia Foreign Defense Ministerial Meeting”, 17 Desember 2015, http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2015/12/17_js_e.pdf, diakses 23 Januari 2017.
- “Kunjungan PM Jepang Shinzo Abe; RI-Jepang Sepakati 22 Poin Kerja Sama”, *Suara Pembaruan*, 16 Januari 2017.
- “Mitra Utama Indonesia; Kerja Sama Ekonomi RI-Jepang Dipererat”, *Suara Pembaruan*, 16 Januari 2017.
- “Pernyataan Pemerintah Indonesia Mengenai Uji Coba Nuklir oleh Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea”, <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/pernyataan-indonesia-uji-coba-nuklir-korea-utara.aspx>, diakses 23 Januari 2017.
- “PM Jepang Merasakan Kehangatan dan Ketulusan Indonesia”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/07543511/pm.jepang.merasakan.kehangatan.dan.ketulusan.indonesia>, diakses 17 Januari 2017.
- Sella Panduarsa Gareta, “Indonesia Fokus bangun Empat Kerja Sama Teknik dengan Jepang”, <http://www.antaranews.com/berita/607419/indonesia-fokus-bangun-empat-kerja-sama-teknik-dengan-jepang>, diakses 17 Januari 2017.
- Sella Panduarsa Gareta, “Kemenperin Dorong Jepang Perkuat Rantai Pasok di Indonesia”, <http://www.antaranews.com/berita/607071/kemenperin-dorong-jepang-perkuat-rantai-pasok-di-indonesia>, diakses 17 Januari 2017.
- “Tegakkan Solusi Damai di LTS”, *Kompas*, 16 Januari 2017.
- Yuni Arisandy, “Kunjungan PM Jepang ke Indonesia Fokus Ekonomi”, http://www.antaranews.com/berita/606345/kunjungan-pm-jepang-ke-indonesia-fokus-ekonomi?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, diakses 17 Januari 2017.